

Markas Koarmada I TNI AL Dipindah dari Jakarta ke Kepri

JAKARTA (IM) - Markas Komando Armada I (Koarmada I) Angkatan Laut akan pindah dari Jakarta ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau, pada 5 Desember 2022.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono telah memberikan batas waktu persiapan pemindahan sebelum akhirnya resmi berpindah markas.

"Saya batasi waktu, (peringatan) Hari Armada 5 Desember nanti kita laksanakan di sana sekaligus perpindahan Komando Armada I Tanjungpinang," kata Yudo selepas memimpin serah terima jabatan di Komplek Satuan Kapal Koarmada I, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/6).

Dalam pemindahan ini, TNI memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia di Tanjungpinang. Untuk mengisi kebutuhan prajurit Koarmada I misalnya, TNI AL akan menarik personel dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IV/Tanjungpinang.

Adapun personel Koarmada I akan mengisi pos-pos di Koarmada Republik Indonesia yang bermarkas di Jakarta. Selain pemindahan Markas Koarmada I, TNI AL akan menggeser Markas Lantamal IV/Tanjungpinang ke Batam. Prajurit TNI AL

yang sebelumnya bertugas di Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam akan digeser untuk mengisi pos di Lantamal IV.

"Jadi tidak secara besar-besaran sehingga lebih efektif, efisien karena sarana prasarana sudah memenuhi syarat," ujar Yudo.

Dengan pemindahan ini, TNI AL nantinya akan menempatkan deretan sistem senjata armada terpadu (SSAT) seperti Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) di wilayah Tanjung Uban, Kepulauan Riau.

Adapun pemindahan Markas Koarmada I tak lepas karena adanya satuan baru TNI AL, Koarmada RI yang dibentuk pada 21 Januari 2022 dengan markasnya di Jakarta.

Selain faktor kehadiran Koarmada RI, pemindahan Markas Koarmada I juga untuk lebih mudah memantau wilayah yang tergolong strategis, antara lain, perairan Sabang, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna Utara, hingga Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I) yang melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia.

"Ini semuanya lebih memudahkan dan lebih efisien apabila unsur-unsur armada ini ada di Tanjung Uban," katanya. ● han

FOTO:ANT



AKSI RERESIK CANDI BOROBUDUR

Sejumlah karyawan Balai Konservasi Borobudur (BKB) mengikuti aksi Reresik Candi Borobudur (membersihkan Candi Borobudur) di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (14/6). Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Purbakala ke-109 yang mengusung tema "Membangun Kebermanfaatan Candi Borobudur dan Kawasannya untuk Masyarakat".

Bawaslu Minta DPR Segera Cairkan Dana Tahapan Pemilu Rp2 Triliun

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta DPR segera cairkan anggaran tahapan pemilu untuk tahun ini.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, DPR telah menjanjikan dana tersebut bakal direalisasikan setelah tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 disahkan. Sebagai informasi, tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (10/6) lalu lewat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022.

"Janjinya kan setelah dalam tahapan disahkan, maka hal tersebut dapat direalisasikan kepada Bawaslu, sehingga kemudian kami dapat melakukan hal-hal bentuk-bentuk pengawasan," ujar Bagja kepada wartawan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (14/6).

Ia menjelaskan, Bawaslu memperoleh alokasi dana total penyelenggaraan Pemilu

2024 dengan nominal sekitar Rp 22 triliun. Bagja merasa, jumlah tersebut sudah sangat rasional bagi kebutuhan kerja Bawaslu. Dana itu dibagi ke dalam 3 tahun anggaran, yakni 2022, 2023, dan 2024.

"(Anggaran) 2022 ini sekitar Rp 2 triliun yang kemudian harus digunakan untuk kesiapan dalam melakukan pengawasan perencanaan, pengawasan verifikasi parpol, baik administrasi maupun faktual," ucap Bagja.

Di samping itu, dana ini juga diperlukan dalam memproses permohonan sengketa dalam pencalonan. Pemrosesan permohonan sengketa ini memerlukan kesiapan para pengawas dari Bawaslu, sehingga pencairan dana dari DPR sangat dibutuhkan.

"Nah, membangun kompetensi dasar (pengawasan) itu tujuan kami di tahun 2022 ini, yaitu melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan kerja sama," ujar Bagja. ● mei

DPR Lantik 4 Anggota PAW, Termasuk Pengganti Azis Syamsuddin

JAKARTA (IM) - Paripurna ke-25 DPR masa sidang tahun 2021-2022 lantik 4 anggota lewat Pergantian Antar-Waktu (PAW). Salah satu yang dilantik adalah pengganti eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang terjerat kasus suap.

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di Gedung DPR, Senayan, pada Selasa (14/6).

Pada kesempatan kali ini, DPR melantik Bahtra dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggantikan Haerul Saleh.

Kemudian, Difriadi dari Fraksi Gerindra dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) 2 menggantikan Muhammad Nur, Riswan Toni DK dari Fraksi Golkar dapil Lampung 2 menggantikan Azis Syamsuddin.

Terakhir, Ravindra Airlangga dari Fraksi Golkar dapil Jawa Barat 5 menggantikan M Ichsan Firdaus yang meninggal.

Lodewijk mengatakan

pelantikan PAW ini sudah sesuai dengan surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Widor.

"Pimpinan dewan telah menerima Keputusan Presiden RI Nomor 62P Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang peresmian pergantian antar-waktu anggota DPR dan MPR sisa masa jabatan tahun 2019-2024," ujar Lodewijk.

Ketua DPR Puan Maharani memandu keempat anggota baru itu untuk membacakan sumpah janji sebagai anggota DPR.

"Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggungjawab terhadap bangsa dan negara RI, tanggungjawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan UUD RI 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran, saya harap saudara ikuti lafal sumpah yang akan saya pandu," kata Puan. ● mei

2 Polhukam

FOTO:ANT



DPR TETAPKAN ANGGOTA DKPP

PERIODE 2022-2027
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) menerima laporan dari Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia (kiri) terkait hasil pembahasan keanggotaan DKPP periode 2022-2027 saat Rapat Paripurna DPR ke-25 Masa Persidangan V Tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/6). Dalam rapat Paripurna tersebut DPR menetapkan tiga calon anggota DKPP periode 2022-2027 yaitu Muhammad Tio Aliansyah, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Warsa Raka Sandi.

Dalam 6 Bulan, 385.980 Serangan Siber ke Kemenkumham, Terbanyak dari AS

Kemenkumham hampir setiap hari diserang ribuan siber. Terbanyak menasar website Kemenkumham, aplikasi persuratan internal, dan aplikasi kepegawaian.

JAKARTA (IM) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendapat serangan siber sebanyak 385.980 dalam kurun

waktu enam bulan. Atau jika dirata-ratakan per hari, ada 2.150 serangan siber yang diterima Kemenkumham.

Serangan siber ke Kemen-

kumham, salah satunya berupa peretasan. Untuk mengantisipasi serangan siber berlanjut, Kemenkumham meluncurkan aplikasi, yakni berupa tim tanggap insiden siber atau Computer Security Incident Response Team (KUMHAM-CSIRT).

Aplikasi itu resmi diluncurkan pada Selasa (14/6) oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budi Revianto. Tujuan pembentukan aplikasi

tersebut, untuk mencegah terjadinya serangan siber yang kian massif dan dilakukan oleh banyak pihak dengan motif beragam.

Motif serangan siber tersebut, mulai dari sekadar coba-coba hingga motif ekonomi, politik, dan ideologi. Serangan juga dilakukan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Kita harus siap dan tanggap menghadapi intoleransi, radikalisme, ancaman terorisme, serta menghadapi ancaman kejahatan lainnya seperti ekonomi, politik, ideologi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk siber," kata Andap di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/6).

"Tujuan dibangunnya KUMHAM-CSIRT adalah untuk menangkis segala bentuk ancaman dan tantangan serangan siber di lingkungan Kemenkumham secara khusus dan umumnya untuk melindungi masyarakat dari itikad yang dapat merusak persatuan, kesatuan, dan demokrasi," terangnya.

Andap mengaku bahwa Kemenkumham hampir setiap hari menerima ribuan serangan siber. Menurut data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkumham, serangan siber paling banyak menasar website Kemenkumham, aplikasi persuratan internal, dan aplikasi kepegawaian.

Khusus terhadap web-

site kemenkumham sendiri, dibebankan Andap, serangan siber itu di antaranya berupa Malicious Session sebanyak 71 persen. Kemudian, Server Side Code Injection sebanyak 21 persen dan Malicious Scan sejumlah 6 persen. Adapun, serangan siber terbesar berasal dari Amerika Serikat sebesar 71 persen.

"Alhamdulillah, terhadap serangan-serangan tersebut, kita berhasil menangkalnya," terang Andap.

Sekadar informasi, CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Beberapa fungsi dari CSIRT, di antaranya adalah untuk memberikan layanan reaktif mulai dari koordinasi insiden, triase insiden, dan resolusi insiden.

Kemenkumham dipilih sebagai satu dari 25 kementerian atau lembaga yang dipercaya untuk membentuk CSIRT. Andap berharap CSIRT dapat dijadikan wujud perlindungan dan kedaulatan data. Khususnya, data-data Warga Negara Indonesia (WNI).

"Kedaulatan data harus diwujudkan, tidak boleh ada kompromi. Kebijakan tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara," ungkapnya. ● han

Dalam RUU KIA, Ibu Hamil Dapat Cuti 6 Bulan dan Keguguran 1,5 Bulan

JAKARTA (IM) - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Salah satu isinya adalah tentang cuti hamil selama 6 bulan dan keguguran 1,5 bulan.

Puan mengatakan, RUU KIA yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, diharapkan bisa segera selesai. Menurutnya, RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia.

Puan mengatakan hal itu terkait dengan keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada hari Kamis (9/6) yang menyepakati pembahasan lebih lanjut RUU KIA bersama Pemerintah.

Ia menilai RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak (golden age) yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang sering mengaitkannya dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.

RUU KIA menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

"Ini harus menjadi upaya bersama yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna

memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak," ujar Puan dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip Selasa (14/6).

Ketua DPR RI ini lantas menyebutkan ada sejumlah hak dasar seorang ibu, antara lain hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, dan prasarana umum.

Selain itu, bagaimana seorang ibu mendapat rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari tempatnya bekerja.

Puan juga mengingatkan pada masa 1.000 HPK yang salah akan berdampak pada kehidupan anak. Jika HPK tidak dilakukan dengan baik, anak dikhawatirkan bisa alami gagal tumbuh kembang serta kecerdasan yang tidak optimal.

"RUU KIA ini hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal. Menjadi tugas negara untuk memastikan generasi penerus bertumbuh menjadi SDM yang dapat membawa bangsa ini makin hebat," katanya.

Ditegaskannya bahwa ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja.

"Ibu bekerja wajib mendapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja," kata Puan.

"RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan," terang Puan.

Menurut dia, penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dengan durasi waktu sebatas tiga bulan saja. Namun dia menjelaskan, dalam RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi enam bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran.

RUU KIA juga mengatur penetapan upah bagi Ibu yang sedang cuti melahirkan, yakni untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh dan mulai bulan keempat upah dibayarkan sebanyak 70 persen. Menurutnya, pengaturan ulang masa cuti hamil ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi Ibu setelah melahirkan.

Ia berharap komitmen Pemerintah mendukung aturan yang ada dalam RUU KIA demi masa depan generasi penerus bangsa. ● mei

PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk
("Perseroan")
PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Danasupra Erapacific Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022.

Sesuai Pasal 52 POJK No.15/POJK.04/2020, pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris paling lambat pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No 15"), dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan No. 3646 Tahun 2015, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Mengusulkan secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- Usul diajukan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- Usul tersebut harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

Jakarta, 15 Juni 2022
PT Danasupra Erapacific Tbk
Direksi

PT. Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juli 2022
Waktu : 09.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Friendly + Unique Meeting Rooms, Hotel Harris Suites FX Sudirman
Jl. Jend. Sudirman, RT-1/RW-3, Senayan Tanah Abang, Jakarta 10270

Mata Acara rapat-rapat tersebut sebagai berikut:

RUPST

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 termasuk didalamnya Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, dan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022.
- Penetapan Honorarium dan/tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Perseutan untuk memratifikasi seluruh tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST :
Mata Acara RUPST ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5
Merupakan Mata Acara yang diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di situs website Perseroan www.mesmineral.co.id, situs website PT Bursa Efek Indonesia dan aplikasi eASY.KSEI.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana format yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.
- Formulir Surat Kuasa dapat diunduh dari situs website Perseroan atau dapat diperoleh setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Adimira Jasa Korporat beralamat di Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Surat Kuasa harus diterima Sekretaris Perusahaan melalui Biro Administrasi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2022 pada pukul 16.15 WIB.
- Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahnya dimasukkan dalam pemilihan kolektif KSEI, dapat pula memberikan kuasa secara online melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://aks.ksei.co.id/> yang disediakan KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal atau tanda bukti diri lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruangan.
- Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir.
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, wajib memenuhi dan mengikuti protokol keamanan dan Kesehatan yang berlaku sebagai berikut:
 - Dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi peserta Rapat dengan suhu tubuh melebihi 37,5° celsius dilarang memasuki Gedung dan ruangan Rapat.
 - Mengenakan masker setiap saat.
 - Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing*.
 - Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
- Bahan-bahan terkait agenda Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan berada di ruangan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Juni 2022
Direksi